

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

KATON NURAHARTO
NPP. 29.0948

*Asdaf Kota Madiun Provinsi Jawa Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: nuraharto64@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problem Statement/Background (GAP): *The COVID-19 pandemic has had an impact on various sectors, one of which is the economy. In Madiun City, East Java province, due to the pandemic, there was a decline in the rate of economic growth which reached -3.39% in 2020, increasing open unemployment in Madiun City in 2020 which reached 8.32% and increase in the poverty rate in Madiun City as many as 1,260 people in 2020. MSMEs as one of the largest economic sectors in Indonesia that support 99% of the business sector in Indonesia became one of the causes of the crisis during the pandemic. This is because 97% of the workforce is absorbed through MSMEs. Therefore, the Central and Regional Governments have several programs such as National economic recovery through MSMEs to move the economy during the pandemic. However, the program still has not been able to fully restore the economy which has been slumped by the pandemic. Therefore, several other strategies are needed in terms of developing MSMEs as the main sector of the national economy to run the economy which has slumped due to the COVID-19 pandemic.* **Purpose:** *The purpose of this thesis research is to identify and analyze the inhibiting and supporting factors as well as strategies that can be carried out in the development of MSMEs in Madiun City.* **Method:** *The research method used is a qualitative research method using descriptive and inductive approaches. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation and questionnaires obtained from primary and secondary data sources. Data analysis uses Andreas Kohne's business development theory and the Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine priority strategies.* **Result:** *MSME development in Madiun City during the COVID-19 pandemic went well due to support for aspects of business ideas, work tools and facilities, business licensing, product and business improvements, product standardization and licensing, as well as consumer response and product improvement. The inhibiting factors include management plans, market and consumer conditions, initial product concepts, production and sales. With a strategy that can be done through business incubation as a priority strategy for the results of the analysis with AHP, business digitization, and the Pro MSME program.* **Conclusion:** *From the supporting and inhibiting factors found three appropriate strategies and the Business Incubation strategy as a priority strategy that can be done in terms of developing MSMEs during the covid-19 pandemic in Madiun City, East Java province through analysis using AHP.*

Keywords: *Micro Small Medium Enterprise Development, Micro Small Medium Enterprise , Analytical Hierarchy Process*

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pandemi *covid-19* berdampak pada berbagai sektor salah satunya ekonomi. Di Kota Madiun provinsi Jawa Timur akibat pandemi terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai -3,39% pada tahun 2020, meningkatnya pengangguran terbuka di Kota Madiun pada tahun 2020 yang mencapai 8,32% dan peningkatan angka kemiskinan di Kota Madiun sebanyak 1.260 jiwa pada tahun 2020. UMKM sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar di Indonesia yang mendukung 99% sektor usaha di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis pada masa pandemi tersebut. Hal ini disebabkan 97% tenaga kerja diserap melalui UMKM. Maka dari itu Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki beberapa program seperti Pemulihan Ekonomi Nasional melalui UMKM untuk menggerakkan perekonomian pada masa pandemi. Akan tetapi program tersebut masih belum dapat sepenuhnya mengembalikan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi. Maka dari itu diperlukan beberapa strategi lain dalam hal pengembangan UMKM sebagai sektor utama ekonomi nasional untuk menjalankan roda perekonomian yang terpuruk akibat pandemi *covid-19*. **Tujuan:** Tujuan penelitian Skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung serta strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan UMKM di Kota Madiun. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan kuesioner yang didapat dari sumber data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan teori pengembangan bisnis Andreas Kohne serta *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan strategi prioritas. **Hasil/Temuan:** Pengembangan UMKM di Kota Madiun pada masa pandemi *covid-19* berjalan dengan baik karena dukungan pada aspek ide usaha, alat dan fasilitas kerja, perizinan usaha, penyempurnaan produk dan usaha, standarisasi dan perizinan produk, serta repon konsumen dan perbaikan produk. Faktor penghambat diantaranya terkait rencana pengelolaan, kondisi pasar dan konsumen, konsep awal produk, produksi dan penjualan. Dengan strategi yang dapat dilakukan melalui inkubasi bisnis sebagai strategi prioritas hasil analisis dengan AHP, digitalisasi bisnis, dan program Pro UMKM. **Kesimpulan:** Dari Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat ditemukan tiga strategi yang sesuai dan strategi Inkubasi Bisnis sebagai strategi prioritas yang dapat dilakukan dalam hal pengembangan UMKM pada masa pandemi *covid-19* di Kota Madiun provinsi Jawa Timur melalui analisis dengan menggunakan AHP.

Kata Kunci: Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Usaha Mikro Kecil Menengah, *Analytical Hierarchy Process*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wabah *coronavirus disease (covid)* menurut *World Health Organization* adalah wabah penyakit yang mengganggu pernapasan dan memberi efek mulai dari flu ringan sampai kepada kondisi yang sangat parah dibanding *Mers-Cov* ataupun *Sars-Cov* (Kirigia and Muthuri, 2020). Penyebaran wabah ini menyebabkan banyak negara termasuk Indonesia menghadapi masa Pandemi *covid-19* hingga sekarang. Kasus penularan dan kematian yang meningkat memaksa masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian yang berdampak pada pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai bidang. Kondisi tersebut membuktikan bahwa dampak buruk pandemi *covid-19* bukan hanya pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang lain seperti pariwisata, perdagangan,

perekonomian dan Investasi (Nasution et al., 2020). Dampak tersebut diketahui dengan adanya penurunan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,07% (*c-to-c*) dibanding tahun 2019 (BPS, 2021).

Kota Madiun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah pengembangan pada Jawa Timur bagian barat (Alina, 2020), juga terdampak pandemi *covid-19* yang menimpa berbagai macam sektor mulai dari kesehatan, sosial hingga perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 di Kota Madiun mencapai -3,39% dari tahun sebelumnya (BPS, 2021). Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tersebut juga berakibat pada terjadinya pemutusan hak kerja (PHK) dari industri yang terdampak pandemi *covid-19* sehingga menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 8,32% (BPS, 2021). Peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk miskin Kota Madiun sebanyak 8830 jiwa pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2021).

Perekonomian Indonesia terbagi atas beberapa sektor salah satunya adalah UMKM. Ketika krisis ekonomi tahun 1997-1998 keadaan ekonomi Indonesia didukung oleh keberadaan UMKM yang masih bisa bertahan pada masa krisis (Putra, 2016). Akan tetapi pada masa pandemi *covid-19* kali ini salah satu sektor perekonomian yang paling terdampak adalah UMKM (Sugiri, 2020). Pada kenyataannya 99% usaha di Indonesia berupa UMKM diantaranya usaha mikro 63,5 juta unit, usaha kecil 783.132 unit dan usaha menengah sebanyak 6.702 unit (Purwanto, 2020). Kontribusi UMKM mencapai 60,3% terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional pada tahun 2019 (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020). Selain itu 97% tenaga kerja diserap melalui UMKM dibandingkan dengan usaha besar (Kartiko and Rachmi, 2021).

Menurut Dinas tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun terdapat 23.618 unit UMKM di Kota Madiun yang berkontribusi sebanyak 41,72% atau sebesar Rp 5,89 T terhadap perekonomian Kota Madiun pada tahun 2019 (Dinas KUKM Provinsi Jawa Timur, 2020). Dapat disimpulkan bahwa keadaan UMKM Kota Madiun memiliki andil besar terhadap perekonomian Kota Madiun, seperti penurunan laju ekonomi, peningkatan angka pengangguran dan peningkatan angka kemiskinan pada masa pandemi *covid-19* saat ini terutama UMKM pada sektor selain jasa dan pertanian yang sangat terdampak oleh pandemi *covid-19*.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Melihat besarnya pengaruh UMKM pada perekonomian nasional maka Pemerintah Pusat melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan untuk UMKM dengan total anggaran sebesar Rp 123,47 T (Purwanto, 2020). Program tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Namun, masih terdapat tujuh juta pekerja kehilangan pekerjaan dari 30 juta UMKM yang bangkrut pada Maret 2021 (Rachmayanti, 2021).

Hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dimana Pemkot Madiun menjalankan program pembangunan Lapak UMKM pada tiap kelurahan untuk menghidupkan kembali perputaran ekonomi secara merata yang dimulai sejak pertengahan tahun 2020 dan secara bergilir diresmikan sejak bulan Januari hingga Agustus tahun 2021. Lapak UMKM ini tersebar di 27 Kelurahan pada 3 Kecamatan yang ada di Kota Madiun dengan menelan biaya pembangunan 15 Miliar Rupiah dan ditujukan untuk 700 UMKM yang merupakan hasil pemberdayaan Pemkot Madiun mulai dari bisnis kuliner, *fashion*, hingga kerajinan tangan (Hayati, 2021). Akan tetapi dengan adanya program lapak

UMKM tersebut belum mampu menggerakkan roda perekonomian secara maksimal di Kota Madiun dibuktikan dengan adanya deflasi pada bulan Juni 2021 sebesar 0,21% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,15 (BPS, 2021)

Menanggapi hal tersebut maka diperlukan strategi lain yang mendukung dan selaras dengan program PEN dari Pemerintah Kota Madiun dan pelaku UMKM untuk melakukan pengembangan UMKM yang terdampak akibat pandemi *covid-19*. Hal tersebut dalam rangka pemulihan ekonomi untuk menggerakkan roda ekonomi pada masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengembangan UMKM maupun pemulihan ekonomi pada masa pandemi *covid-19*. Penelitian Nungky Wanodyatama Islam tahun 2021 yang berjudul Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Malang menemukan bahwa pemerintah telah meluncurkan Program PEN yang menjadikan UMKM sebagai prioritas dengan memberi akselerasi akses UMKM kepada dana tunai dan pengembangan UMKM. Serta beberapa langkah strategis Pemkab Malang dalam mengembangkan UMKM yang terdampak pandemi (Islami, 2021). Penelitian Edy Sutrisno tahun 2020 dengan judul Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata menemukan bahwa Strategi pemulihan ekonomi Indonesia di sektor UMKM dengan memberi pendampingan usaha, insentif pajak, pelonggaran kredit dan perluasan serta pelatihan *e-learning*. Sedangkan strategi pengembangan pariwisata berfokus pada pengembangan destinasi wisata, SDM, kelembagaan dan infrastruktur pariwisata (Sutrisno, 2020). Penelitian Nafis Dwi Kartiko dan Ismi Fathia Rachmi tahun 2021 yang berjudul Strategi Pemulihan Pandemi Covid-19 Bagi Sektor UMKM Di Indonesia menemukan bahwa banyak permasalahan pada UMKM yang terdampak pandemi dan telah dilakukan upaya oleh Pemerintah tetapi tidak berjalan efektif maka diperlukan strategi jangka panjang dengan menggunakan *roadmap* pengembangan UMKM berbasis digital serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi untuk memberdayakan UMKM melalui CSR (Kartiko & Rachmi, 2021). Penelitian Ika Masruroh, dkk tahun 2021 yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Di Indonesia menemukan bahwa pandemi covid-19 berdampak pada UMKM terutama dalam hal pendapatan, tenaga kerja, pelunasan kredit serta ketersediaan modal. Pemerintah berusaha mengatasi dampak dengan kebijakan prioritas dukungan, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja, digitalisasi UMKM, intensif pajak dan bantuan sosial (Masruroh, et al, 2021). Serta penelitian Vina Natasya dan Pancanawati Hardiningsih tahun 2021 yang berjudul Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi menemukan bahwa Perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh pemberian bantuan sosial, insentif pajak dan perluasan modal kerja (Vina & Hardiningsih, 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. penelitian yang dilakukan oleh peneliti berguna untuk mengisi kekosongan penelitian terdahulu dengan adanya perbedaan pada sudut pandang penelitian yakni mengenai strategi pengembangan UMKM dan lokasi penelitian yakni di Kota Madiun serta penggunaan teknik analisis *analytical*

hierarchy process (AHP) yang memberikan hasil berbeda guna melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung serta strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan UMKM di Kota Madiun.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Cresswell, 2018:157). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan kuesioner yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Kabid Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (1 orang), Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro (1 Orang) secara *purposive sampling*. Dan Pelaku UMKM (3 Orang) serta Masyarakat Konsumen (3 Orang) secara *snowball sampling*. Analisis data menggunakan teori pengembangan bisnis Andreas Kohne (Kohne, 2019) serta *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan strategi prioritas dengan melibatkan beberapa pertimbangan alternative yang dipetakan secara hierarki agar (Yuuf dkk, 2020:37).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Madiun

Peneliti menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengembangan UMKM di Kota Madiun dengan menggunakan teori pengembangan usaha dari Andreas Kohne, 2019. Dimana indikatornya meliputi Ide Usaha, Rencana Pengelolaan, Alat dan Fasilitas Kerja, Perizinan Usaha, Rencana Modal Usaha, Konsep Awal Produk, Penyempurnaan Produk dan Usaha, Standarisasi dan Perizinan Produk, Produksi, Penjualan, Respon Konsumen dan Perbaikan Produk.

A. Faktor Pendukung

- Ide Usaha

Suatu usaha tercipta dikarenakan terdapat ide awal yang mendorong seseorang dalam melakukan kegiatan berusaha. Ide usaha tersebut dapat berasal dari inovasi murni yang berasal dari pribadi seseorang dalam menciptakan produk maupun modifikasi atau penyempurnaan terhadap ide yang sudah ada sebelumnya. Untuk merangsang munculnya ide usaha dari masyarakat, terdapat pelatihan dari Disnaker KUKM Kota Madiun yang sifatnya *shortcourse* atau pelatihan jangka pendek. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengasah keterampilan pada masyarakat sehingga dapat dikembangkan dan digunakan sebagai mata pencaharian.

Diketahui bahwa sebanyak 167 orang atau sekitar 34% alumni program pelatihan Disnaker KUKM Kota Madiun tahun 2021 membuka usaha sendiri setelah mengikuti pelatihan. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa pelatihan keterampilan dari Disnaker KUKM Kota Madiun mendorong penciptaan ide usaha masyarakat. Sehingga penulis menggolongkan indikator ide usaha menjadi

faktor pendukung dalam hal pengembangan UMKM karena dibantu dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun.

- **Alat dan Fasilitas Kerja**

Alat dan fasilitas dalam usaha berupa peralatan yang digunakan untuk proses produksi hingga distribusi atau pemasaran ke konsumen. Terdapat beberapa dukungan berupa alat produksi bagi pelaku UMKM baik dari Pemerintah maupun dari swasta seperti Perguruan Tinggi yang ada di Kota Madiun, BUMN, hingga perusahaan dengan program kemitraan maupun berupa CSR (*Corporate Social Responsibility*). Selain itu juga terdapat fasilitas kerja berupa lapak UMKM sebagai lokasi produksi dan distribusi produk kepada konsumen yang tersebar di 27 kelurahan pada 3 kecamatan di Kota Madiun yang mampu menampung 700 pelaku UMKM.

Terdapat pula dukungan fasilitas promosi produk usaha melalui Galeri UMKM online pada laman <https://www.umkm.madiunkota.go.id> serta Galeri UMKM yang berada di pusat perbelanjaan di Kota Madiun. Serta kegiatan rutin pameran UKM yang selalu diadakan setiap tahun oleh Disnaker KUKM Kota Madiun maupun oleh perusahaan dan BUMN yang berada di wilayah Kota Madiun.

- **Perizinan Usaha**

Perizinan usaha diperlukan untuk mendapatkan legalitas atas usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Bentuk legalitas tersebut adalah melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk mengisi NIB saat ini memanfaatkan digitalisasi pemerintahan atau *e-government* melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan persyaratan yang mudah.

Berdasarkan penjelasan Bapak Agus Mursidi, AP selaku Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun diketahui bahwa saat ini pelaku UMKM memerlukan perizinan usaha yakni NIB dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang dapat diproses melalui OSS. Beliau juga menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah dari Dinas Penanaman Modal terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga Disnaker KUKM sifatnya hanya sebagai fasilitator yang mendorong dan membantu pelaku UMKM dalam melengkapi persyaratan untuk mendapat izin usaha. Perizinan usaha di Kota Madiun melalui OSS dapat diakses pada laman <https://perizinan.madiunkota.go.id> yang sudah terintegrasi dengan <https://oss.go.id> milik Kementerian Investasi dan Penanaman Modal.

- **Modal Usaha**

Modal usaha merupakan salah satu indikator penting dalam menjalankan suatu usaha. Tanpa modal suatu usaha tidak bisa menjalankan proses produksinya. Pada masa pandemi saat ini banyak dukungan yang diberikan dari pemerintah terkait bantuan modal bagi pelaku UMKM di Kota Madiun. terdapat Bantuan Produktif Usaha Mikro yang ditujukan bagi pelaku UMKM dari Pemerintah Pusat melalui program PEN. Dengan bantuan tersebut para pelaku UMKM mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta per bulan pada tahun 2020 dan Rp 1,2 juta per bulan pada tahun 2021.

Pada tahun 2020 terdapat 2.786 pendaftar BPUM sedangkan pada tahun 2021 terdapat 4.631 penerima BPUM. peningkatan pendaftar diakibatkan kuota penerima yang diperbanyak oleh Pemerintah Pusat dan mayoritas pendaftar pada tahun 2021 adalah masyarakat yang baru memulai

usaha. Dengan adanya bantuan tersebut turut membantu pelaku UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi akibat dari pandemi *covid-19*.

Dukungan terkait modal bagi pelaku UMKM bukan hanya pada program BPUM saja. Tetapi terdapat program dari Pemerintah Kota Madiun terkait kredit murah. sejak tahun 2017 Pemkot Madiun melakukan penyertaan modal sebesar Rp 12 Miliar ke Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kota Madiun. program tersebut hanya ditujukan bagi pelaku usaha yang memiliki KTP dan tempat usaha di Kota Madiun dengan syarat sudah memiliki IUMK.

- Penyempurnaan Produk dan Usaha

Dalam menjalankan suatu usaha penyempurnaan produk dan usaha penting untuk dilakukan guna mengembangkan usaha yang dijalankan. Berkaitan dengan hal tersebut pihak Disnaker KUKM Kota Madiun selain memberikan pelatihan tetapi juga memberikan pendampingan. pendampingan untuk memastikan pelatihan yang didapat dapat dilaksanakan dan di eksekusi dengan baik oleh para pelaku UMKM. Di Kota Madiun setiap tahun terdapat rekrutmen tenaga pendamping Koperasi dan UMKM dari Disnaker KUKM Kota Madiun yang bertujuan untuk melakukan penguatan pelaku koperasi dan UMKM dalam mengatasi masalah dengan sasaran kepada koperasi dan UMKM yang telah mengikuti pelatihan dari Disnaker KUKM Kota Madiun.

Selain itu juga terdapat tujuh lembaga non pemerintahan yang berpartisipasi dalam upaya penyempurnaan produk dan usaha untuk pengembangan UMKM di Kota Madiun. dukungan tersebut baik secara bantuan melalui CSR maupun dalam bentuk kemitraan yang berkelanjutan. Serta juga terdapat paguyuban antar pelaku UMKM yang berguna sebagai ikatan silaturahmi antar pelaku UMKM yang memiliki jenis atau lokasi usaha yang sama. keberadaan paguyuban UMKM tersebut membantu memudahkan koordinasi antar pelaku UMKM, upaya pengembangan bersama dan kerjasama antar pelaku UMKM.

- Standarisasi dan Perizinan Produk

Standarisasi dan perizinan produk memiliki arti yang sama pentingnya dengan perizinan usaha. Jika perizinan usaha sebagai bentuk legalitas berdirinya usaha, pada standarisasi dan perizinan produk merupakan legalitas dan hasil terujinya produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Berkaitan dengan standarisasi dan perizinan produk hasil dari para pelaku UMKM saat ini sudah terdapat dukungan perizinan dari Disnaker KUKM Kota Madiun yang berperan sebagai fasilitator. Dalam hal ini Disnaker KUKM Kota Madiun sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan pihak standarisasi produk terkait. Hal tersebut untuk membantu mempermudah proses standarisasi produk dari pelaku UMKM.

Standarisasi dan perizinan produk yang biasa dilakukan pelaku UMKM yang bersifat sebagai produsen sebuah produk terutama makanan atau minuman kemasan ialah perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk sertifikasi halal. Penulis menggolongkan indikator standarisasi dan perizinan produk sebagai faktor pendukung pengembangan UMKM di Kota Madiun. hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa bantuan yang diberikan dari Disnaker KUKM Kota Madiun sebagai fasilitator untuk membantu pengurusan izin pelaku UMKM kepada instansi terkait. Selain itu juga terdapat kemudahan dan proses perizinan yang cepat serta gratis dari lembaga yang berwenang mengeluarkan izin seperti program SEHATI dari Kementerian Agama.

Dengan begitu standarisasi dan perizinan produk yang berguna bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produknya dapat didapatkan dengan mudah.

- **Respon Konsumen dan Perbaikan Produk**

Dalam menjalankan suatu usaha mengetahui respon konsumen terhadap produk dan pelayanan yang diberikan oleh pelaku UMKM merupakan hal yang penting untuk melakukan perbaikan agar usaha dapat menjadi lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut untuk proses perbaikan produk dengan mengetahui respon konsumen sudah didukung dengan teknologi. dukungan teknologi yang dimaksud dalam proses perbaikan produk melalui respon konsumen ialah melalui fitur *review* atau ulasan yang terdapat pada aplikasi *e-commerce*. Dengan adanya kemudahan melalui aplikasi berbagi pesan seperti *whatsapp* yang memudahkan konsumen untuk langsung memberikan tanggapan terhadap kualitas produk yang dibeli kepada penjual.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas penulis mengkategorikan indikator respon konsumen dan perbaikan produk sebagai faktor pendukung bagi pengembangan UMKM terutama di Kota Madiun. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan teknologi dan kesadaran masyarakat untuk turut menyampaikan kritik dan saran bagi pelaku UMKM agar selalu memperbaiki kualitas produk dan pelayanan.

B. Faktor Penghambat

- **Rencana Pengelolaan**

Rencana pengelolaan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu usaha. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada ditemukan pelaku usaha yang gulung tikar akibat kurangnya perencanaan pengelolaan usaha. masih terdapat pelaku UMKM yang tidak merencanakan proyeknya dengan matang serta hanya berorientasi terhadap *profit* tanpa memikirkan proses untuk menciptakan produk berkualitas agar usahanya dapat menjadi usaha jangka panjang. Terutama pada masa pandemi dimana hambatan dalam berusaha semakin besar. Sehingga pelaku UMKM tanpa pengelolaan yang baik dan benar pasti tidak bisa menghadapi krisis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Disnaker KUKM Kota Madiun diketahui bahwa terdapat UMKM yang tidak lagi beroperasi atau bangkrut pada tahun 2018 sebesar 180 UMKM, pada 2019 terdapat 165 UMKM, pada tahun 2020 terdapat 560 UMKM dan 320 UMKM pada tahun 2021. Dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan usaha yang tutup maupun bangkrut pada masa pandemi pada tahun 2020 dan 2021 dibanding pada sebelum pandemi *covid-19*.

Terdapat program untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui studi banding ke daerah lain terkait pengelolaan UMKM dan juga terdapat seminar dari para pelaku UMKM yang sudah berhasil bagi pelaku UMKM lain. Akan tetapi hal tersebut masih belum bisa menghindarkan pelaku UMKM dari kebangkrutan dikarenakan kuota peserta studi banding dan seminar yang terbatas serta kemampuan tiap pelaku UMKM dalam mengelola bisnisnya secara baik juga berbeda. Hal tersebut dibuktikan dari data yang diperoleh penulis dari Disnaker KUKM Kota Madiun bahwa pada studi banding ke Bali tahun 2021 hanya diikuti 200 pelaku UMKM serta program studi banding ke Yogyakarta hanya 350 peserta. Jauh dari jumlah keseluruhan pelaku UMKM di Madiun yang mencapai 23.000 UMKM.

Kemampuan pribadi pelaku UMKM dalam mengelola usaha dan kondisi pasar juga turut mempengaruhi rencana pengelolaan usaha yang dijalankan. Maka dari itu berdasarkan penjelasan

diasas penulis menggolongkan indikator rencana pengelolaan sebagai faktor penghambat dalam pengembangan UMKM. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi berlangsungnya perencanaan usaha yang sudah disusun. Baik dari individu pelaku UMKM maupun dari lingkungan.

- **Kondisi Pasar dan Konsumen**

Kondisi pasar dan konsumen memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pendapatan dari para pelaku UMKM. Hal tersebut dapat dilihat ketika terjadinya pandemi *covid-19* yang juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat yang langsung berdampak kepada pelaku UMKM. Kondisi yang tidak pasti saat pandemi berdampak terhadap pendapatan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat mengurangi konsumsi sekunder. Dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan beraktivitas juga turut menyebabkan masyarakat sebagai konsumen tidak bisa menjangkau pelaku-pelaku UMKM di sekitar.

Diketahui laju inflasi bulanan Kota Madiun pada Tahun 2021 masih mengalami deflasi pada Bulan Februari, Maret, dan Juli. Faktor persebaran *covid-19* yang tinggi pada awal dan pertengahan tahun 2021 juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang terganggu akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang diperketat. Hal tersebut membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih terpengaruh oleh keadaan pada saat pandemi *covid-19*.

- **Konsep Awal Produk**

Konsep awal produk memiliki peranan sebagai proses untuk menciptakan produk yang sempurna dan siap dipasarkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi UMKM terutama dalam hal permodalan. Terdapat kendala dalam penciptaan konsep awal produk atau "*prototype*" karena tidak ada bantuan pendanaan dan alat. Padahal dalam menciptakan konsep produk memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dari tiga pelaku UMKM yang diwawancarai penulis semuanya memberikan keterangan ketika menciptakan konsep awal produk sebagai langkah awal memulai usaha menggunakan dana pribadi yang cukup banyak dan besarnya berbeda.

Terdapat modal yang cukup banyak digunakan dalam menciptakan konsep awal produk yang berasal dari uang pribadi pelaku UMKM tanpa adanya bantuan permodalan dan peralatan dari Pemerintah atau pihak lain. Maka dari itu penulis menggolongkan indikator konsep awal produk atau "*prototype*" termasuk dalam faktor penghambat pengembangan UMKM karena tidak ada bantuan yang diterima baik dalam bentuk permodalan dan peralatan bagi masyarakat yang hendak memulai usahanya. Hal ini dikecualikan bagi pelaku UMKM yang sudah memiliki usaha dan hendak mengembangkan produk baru karena dapat memanfaatkan modal hasil usaha, bantuan permodalan dan peralatan yang sudah diterima sebelumnya.

- **Pemasaran**

Pemasaran merupakan hal yang vital dalam suatu usaha. tanpa adanya pemasaran produk yang telah di produksi tidak bisa menghasilkan keuntungan dan modal untuk proses produksi berikutnya. Hal tersebut yang dialami para pelaku UMKM di Kota Madiun pada masa pandemi *covid-19*. Terdapat penurunan daya beli masyarakat yang mengganggu produktivitas mereka karena berkurangnya penjualan. Sehingga banyak stok produk yang sudah terlanjur diproduksi tapi tidak segera laku dipasarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat pada masa

pandemi *covid-19* sehingga mempengaruhi omzet dari pelaku UMKM di Kota Madiun. Dampak dari adanya pandemi selain mempengaruhi kondisi ekonomi para konsumen juga mempengaruhi kebiasaan beraktivitas masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan pembatasan kegiatan masyarakat diluar ruangan yang turut mempengaruhi hasil penjualan pelaku UMKM.

Guna mengatasi hal tersebut pelaku UMKM melakukan penjualan secara *online* untuk menjangkau konsumennya. Langkah tersebut terbukti membuahkan hasil dengan dibuktikan melalui peningkatan omzet yang terjadi pada tahun 2021. Akan tetapi hal yang berbeda akan terjadi jika Ibu Danu tidak turut serta membantu usaha orang tuanya. Permasalahan tersebut muncul dikarenakan kurangnya keterampilan dan kemahiran pelaku UMKM yang sudah lanjut usia dalam mengoperasikan gawai untuk membantu pemasaran. Hal tersebut yang terjadi pada UMKM lain yang tidak bisa bertahan pada masa pandemi akibat kurangnya keterampilan mengoperasikan teknologi sehingga menyebabkan usaha mereka bangkrut.

- **Produksi**

Produksi merupakan proses menghasilkan produk untuk dipasarkan yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Akan tetapi pada masa pandemi proses produksi dari pelaku UMKM terhambat dikarenakan berbagai persoalan. Terdapat penurunan pemasaran yang menyebabkan terhambatnya produksi akibat kurangnya pemasukan sehingga menyebabkan pelaku UMKM terpaksa mengurangi karyawan untuk mempertahankan usaha.

Pada masa pandemi *covid-19* di tahun 2020 dan 2021 menyebabkan penurunan jumlah karyawan dari pelaku UMKM yang diwawancarai oleh penulis. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab menurunnya hasil produksi pelaku UMKM di Kota Madiun pada masa pandemi. Selain adanya hambatan dari hasil pemasaran dan berkurangnya karyawan. Proses produksi juga terhambat akibat sulitnya mengakses penyedia bahan baku dikarenakan berbagai macam pembatasan.

3.2. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Madiun

A. Strategi

- **Inkubasi Bisnis**

Inkubasi bisnis adalah upaya pemberian pelatihan dan pendampingan secara terstruktur dan terukur mulai dari proses awal usaha dimulai hingga pelaku UMKM dirasa sudah mampu mengelola usahanya secara mandiri dan profesional. Sasaran dari inkubasi bisnis ada dua macam, yakni untuk menciptakan pelaku usaha baru atau mengembangkan usaha pemula yang inovatif dan produktif.

Melalui penelitian oleh penulis telah diketahui bahwa pada pengembangan UMKM di Kota Madiun terdapat beberapa hambatan diantaranya terkait rencana pengelolaan UMKM, kondisi pasar dan konsumen, konsep awal produk, pemasaran dan produksi. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang optimalnya pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh Disnaker KUKM Kota Madiun karena tidak ada kesinambungan antara program satu dengan program yang lain. Terutama program lanjutan dari pelatihan berupa pendampingan yang masih kurang optimal. Terbukti dari hasil penelitian penulis diketahui hanya terdapat 17 pendamping bagi 23.618 UMKM yang ada di Kota Madiun pada tahun 2021.

Maka dari itu perlu dilaksanakan Inkubasi Bisnis yang akan memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan dari awal ide usaha hingga usaha telah berjalan. Menurut Kasi

Pemberdayaan Usaha Mikro Disnaker KUKM Kota Madiun Bapak Angga Wahyu Nurcahyo, SE melalui wawancara dengan penulis beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan inkubasi bisnis ini dilaksanakan oleh inkubator. Inkubator pada pelaksanaan inkubasi bisnis di Kota Madiun adalah Disnaker KUKM Kota Madiun dengan kewajiban memberikan layanan produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan manajemen, pembiayaan dan teknologi pada pelaksanaan inkubasi bisnis.

Tahapan dari strategi inkubasi bisnis mulai dari Pra Inkubasi, proses inkubasi hingga pasca inkubasi. Dari tabel tersebut diketahui bahwa inti pelaksanaan inkubasi bisnis adalah melalui pelatihan dan pendampingan pada setiap aspek terkait pengembangan usaha mulai dari ide hingga pemasaran. Selanjutnya terdapat kewajiban inkubator untuk menyediakan relasi dan jaringan antar peserta, monitoring usaha serta akses pembiayaan.

Melalui program inkubasi bisnis tersebut diharapkan tercipta UMKM yang tahan dalam berbagai keadaan serta krisis dan adaptif dengan perubahan zaman karena memiliki dasar pengelolaan dan perencanaan yang baik dalam hal modal, produksi hingga pemasaran. Sehingga dapat menjadi UMKM yang berkualitas secara produk maupun pelayanan. Selain itu juga dapat meningkatkan taraf usaha pelaku UMKM dengan cara memperluas pasarnya dan menjalin kemitraan strategis antar pelaku UMKM yang berdampak dan bermanfaat bagi UMKM lainnya didukung akses pembiayaan dan permodalan yang terjamin.

- Digitalisasi Bisnis

Mengacu pada hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan masyarakat selaku konsumen diketahui terdapat fenomena pandemi *covid-19* yang mempercepat perubahan perilaku berbelanja masyarakat dari sistem langsung di toko menjadi sistem *online*. Perubahan pola belanja konsumen merupakan hal yang pasti, namun dengan adanya pandemi *covid-19* yang mengakibatkan banyak kebijakan pembatasan kegiatan bermasyarakat membuat perubahan tersebut semakin cepat. Pada masa pandemi menunjukkan terjadinya peningkatan minat belanja masyarakat sebesar hampir 40% melalui *e-commerce* dan penurunan hampir 50% masyarakat yang berbelanja secara langsung di toko. Hal tersebut menyebabkan beberapa pelaku UMKM terdampak karena tidak memiliki keterampilan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi. Dengan adanya pandemi *covid-19* pelaku UMKM harus cepat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi agar tetap bisa bertahan dalam dunia usaha. Dan masih terdapat 47% pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan teknologi sama sekali. Persoalan utama ketika harus beranjak ke sistem digital adalah sumber daya manusia (SDM) dari para pelaku UMKM itu sendiri.

Berkaitan dengan pelaku UMKM yang sudah lanjut usia dan kesulitan untuk belajar, memerlukan solusi tersendiri yakni melalui pendampingan khusus yang dilakukan melalui kader UMKM digital. Kader UMKM digital ini sebagai kader pendamping khusus bidang pengelolaan digital UMKM yang merupakan hasil seleksi Disnaker KUKM Kota Madiun pada masyarakat. Kader UMKM digital diambil dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih di bidang digital untuk ikut mendampingi secara langsung atau bahkan mengambil alih pengelolaan digital dari UMKM yang dimiliki oleh lanjut usia. Sehingga digitalisasi bisnis UMKM yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku UMKM Kota Madiun tanpa terkecuali. Setelah seluruh pelaku UMKM mampu mengoperasikan teknologi digital melalui pelatihan dan pendampingan Kader UMKM digital maka digitalisasi bisnis UMKM akan dapat dilaksanakan baik

secara pribadi dengan memperluas pemasaran melalui *e-commerce* dengan memanfaatkan segala *platform* yang ada maupun melalui program digitalisasi bisnis yang dirancang Disnaker KUKM.

Mengenai digitalisasi bisnis UMKM yang dirancang, Bapak Angga selaku Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro Disnaker KUKM menjelaskan bahwa setelah pelatihan dan pendampingan Kader digital UMKM akan ada pengembangan pada *platform website* Galeri UMKM Kota Madiun <https://umkm.madiunkota.go.id>. Pengembangan tersebut dengan konsep menjadikan website tersebut sebagai *One Gate System* bagi pelaku UMKM dalam mengakses segala kebutuhannya. Hal ini dikarenakan digitalisasi bisnis bukan hanya sekedar pemasaran. Tetapi juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan UMKM. Maka dari itu selain pengembangan *website* untuk pemasaran dan penjualan produk UMKM, tetapi juga sebagai wadah berkumpulnya seluruh pelaku UMKM di Kota Madiun secara virtual dengan memiliki akun masing-masing. Bapak Angga menjelaskan bahwa pada *website* tersebut nantinya akan didukung dengan pemenuhan segala kebutuhan bisnis mulai dari pendanaan, bahan baku, perizinan usaha, perizinan produk yang akan terkoneksi melalui *website* tersebut. Sehingga diharapkan pada *website* tersebut akan terbentuk ekosistem digital UMKM di Kota Madiun yang memudahkan semua kebutuhan pelaku UMKM mulai pendanaan, bahan baku, produksi hingga pemasaran. Melalui pengembangan itu juga akan menjadikan *platform* tersebut sebagai *big data* UMKM yang ada di Kota Madiun guna mendukung Pemerintah Kota Madiun dalam mengambil kebijakan terkait UMKM yang ada di Kota Madiun.

Selain itu Pemerintah Kota Madiun juga mendorong penyedia jasa aplikasi seperti *gofood* dan *grabfood* untuk mendata seluruh UMKM yang ada di Kota Madiun agar dapat masuk pada aplikasi. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan akses konsumen terhadap UMKM di Kota Madiun yang tersedia pada berbagai *platform* sekaligus untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan konsumen yang sempat menurun akibat dari pandemi *covid-19*.

- Pro-UMKM

Strategi berikutnya adalah melalui program Pro-UMKM. Menurut Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun melalui wawancara dengan penulis, Program Pro-UMKM merupakan segala bentuk dukungan yang dilakukan pemerintah untuk membantu pengembangan UMKM pada masa pandemi *covid-19*. Seperti yang diketahui pada masa pandemi *covid-19* saat ini, UMKM banyak yang mengalami penurunan penjualan dan pendapatan hingga gulung tikar. Di satu sisi pada kalangan masyarakat sendiri juga terjadi kesulitan dalam hal ekonomi akibat dari pandemi yang terjadi. Namun pada masa pandemi *covid-19* masih terdapat beberapa pihak yang tidak begitu merasakan dampak ekonomi karena memiliki gaji dan tunjangan yang tetap, seperti yang dialami oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Madiun meluncurkan program Pro UMKM dengan melalui aplikasi Pro UMKM yang digunakan oleh PNS dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintahan Kota Madiun. Melalui aplikasi tersebut PNS dan Anggota DPRD diwajibkan untuk membeli dan berbelanja pada UMKM-UMKM di sekitar rumah dan lingkungannya lalu melaporkannya melalui *platform* aplikasi Pro-UMKM. Melalui aplikasi tersebut akan didapatkan data jumlah hasil belanja PNS dan anggota DPRD yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian prestasi kerja terutama untuk PNS di lingkup Kota Madiun.

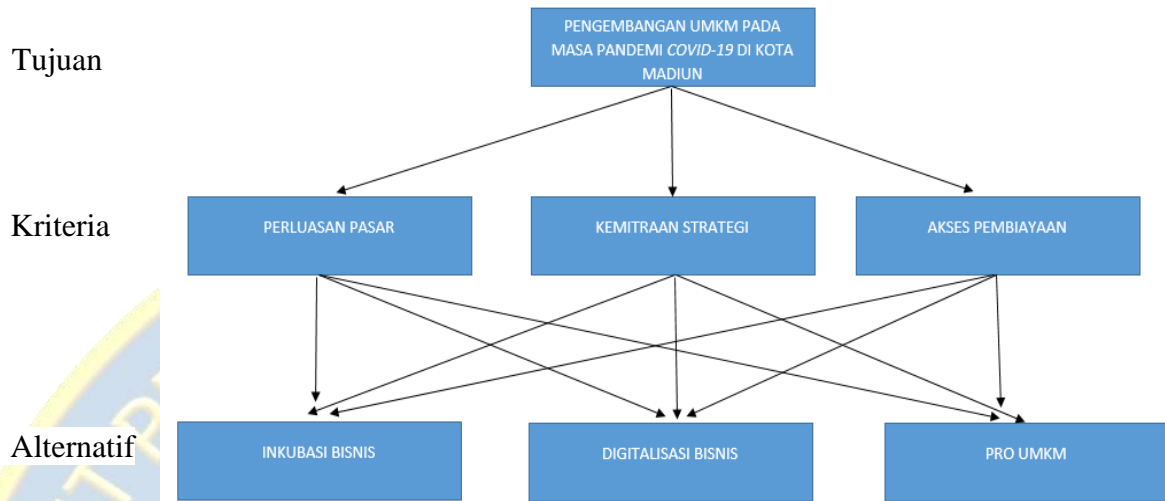
Dengan begitu maka akan muncul dorongan bagi para PNS dan Anggota DPRD untuk lebih memilih berbelanja di UMKM sekitarnya daripada ke toko swalayan dan toko modern. Maka diharapkan akan

terjadi perputaran uang di tingkat bawah guna menggerakkan roda perekonomian yang melambat akibat pandemi *covid-19*. Selain itu juga guna mendukung para pelaku UMKM yang terdampak karena pandemi *covid-19*. program Pro-UMKM ini juga sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 81 dimana melalui PP tersebut diwajibkan mengalokasikan 40% nilai belanja barang/jasa Pemerintah Daerah melalui pelaku UMKM. Bapak Agus menjelaskan bahwa saat ini setiap kegiatan di Pemkot Madiun wajib menggunakan produk maupun jasa dari UMKM di Kota Madiun. Contohnya adalah dengan melibatkan para pelaku UMKM dalam setiap kegiatan di kantor Pemerintahan dan Perusahaan yang ada di Kota Madiun. Misalnya ketika ada acara rapat atau *ceremony*. Konsumsi yang diberikan kepada peserta harus menggunakan produk UMKM di wilayah sekitarnya. Begitu pula dengan pengadaan-pengadaan fasilitas, konsumsi dan Alat Tulis Kantor (ATK) setiap tahunnya juga harus melalui UMKM yang ada di wilayah tersebut. Selain itu dalam setiap giat *ceremony* yang dilakukan juga harus menyediakan *stand-stand* UMKM agar menjadi tempat UMKM dalam mempromosikan dan menjual produknya.

Diketahui terjadi pemanfaatan anggaran sebesar Rp 440.432.411.684 atau 40% dari APBD Kota Madiun untuk belanja barang/jasa melalui UMKM atau penyedia yang berafiliasi dengan UMKM pada tahun anggaran 2022. Pelibatan UMKM pada penyerapan anggaran barang/jasa Pemkot Madiun tersebut juga di *input* pada aplikasi sehingga perputaran uang pada pelaku UMKM juga dapat dipantau dan UMKM mana saja yang terdampak langsung dapat diketahui. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang lain dapat menggunakan barang/jasa dari UMKM yang belum pernah digunakan agar program Pro UMKM dapat dilaksanakan merata. Untuk penyaluran BPNTD Pemkot Madiun menganggarkan dana sebesar Rp 21.248.848.000 yang ditujukan bagi 7.847 Keluarga Penerima Manfaat dengan isi bantuan dari produk pelaku UMKM Kota Madiun. Dengan begitu perputaran ekonomi yang ada di Kota Madiun akan bergerak karena keterlibatan pelaku UMKM dalam memberikan suplai pada bantuan daerah bagi masyarakat terdampak.

B. Strategi Prioritas

Untuk mendapatkan strategi prioritas terkait pengembangan UMKM pada masa pandemi *covid-19* diperlukan analisis lebih lanjut melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). tahap pertama yang dilakukan adalah dengan membentuk hierarki. Hierarki tersebut terdiri atas tujuan, kriteria yang mendasari tujuan serta alternatif strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut susunan hierarki proses AHP dalam hal strategi pengembangan UMKM pada masa pandemi *covid-19* di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1. Susunan Hierarki AHP
 Sumber: Diolah Penulis, 2022

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pada penyusunan hierarki proses AHP penelitian kali ini menggunakan tujuan yakni pengembangan UMKM pada masa pandemi *covid-19* di Kota Madiun. Elemen kriteria yang digunakan adalah merupakan arah kebijakan pemberdayaan UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni perluasan pasar, kemitraan strategis dan akses pembiayaan. Selanjutnya pada elemen alternatif terdapat strategi yang dilakukan dalam pengembangan UMKM pada masa pandemi *covid-19* di Kota Madiun yang akan ditentukan strategi prioritasnya menggunakan metode AHP. Tahap berikutnya adalah melakukan penilaian dengan menyusun matriks perbandingan berpasangan. Penilaian pada tahap ini dilakukan oleh pakar atau *experts* yang ditentukan penulis dalam memberikan penilaian pada matriks perbandingan tersebut. Pemilihan pakar tersebut didasari oleh pengetahuan dan kewenangan yang dimiliki dalam pengembangan UMKM di Kota Madiun yakni Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun, Kabid Pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro. Dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penghitungan AHP Pada Aplikasi Superdecisions

NO	PAKAR	HASIL				
		Name	Graphic	Ideals	Normals	Raw
1.	Agus Mursidi, AP	DIGITALISASI BISNIS		0.261971	0.196950	0.098475
		INKUBASI BISNIS		1.000000	0.751799	0.375900
		PRO UMKM		0.068171	0.051251	0.025625
2.	Maryanto S.TP, M.Si	DIGITALISASI BISNIS		0.276138	0.192000	0.096000
		INKUBASI BISNIS		1.000000	0.695306	0.347653
		PRO UMKM		0.162079	0.112694	0.056347
3.	Angga Wahyu Nurchahyo, SE	DIGITALISASI BISNIS		0.169778	0.126305	0.063152
		INKUBASI BISNIS		1.000000	0.743940	0.371970
		PRO UMKM		0.174416	0.129755	0.064878

Sumber: diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat diketahui bahwa menurut penilaian pakar, strategi yang sesuai dengan arah kebijakan pemberdayaan UMKM di Indonesia yakni perluasan pasar, kemitraan strategis dan akses pembiayaan merupakan inkubasi bisnis sehingga dapat dijadikan sebagai strategi prioritas dalam pengembangan UMKM pada masa pandemi *covid-19* di Kota Madiun.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengembangan UMKM di Kota Madiun pada masa pandemi *covid-19* dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penulis menemukan temuan penting yakni terdapat hambatan dalam hal pengembangan UMKM di Kota Madiun terutama dalam hal rencana pengelolaan, kondisi pasar dan konsumen, produksi, serta pemasaran dan pengembangan produk. Dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi akibat dari pandemi yang menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat di luar ruangan. Selain itu juga tidak terlaksananya upaya dari pemerintah secara lancar. Sama halnya dengan penelitian Nafis Dwi Kartiko dan Ismi Fathia Rachmi (2021) bahwa terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu tidak tersalurkannya kredit/permodalan terhadap sektor UMKM dan masih tingginya angka pengangguran akibat pandemi.

Dalam pengembangan UMKM di Kota Madiun juga terdapat dukungan berupa bantuan modal, alat dan fasilitas kerja, pelatihan dan pendampingan serta bantuan perizinan, produksi dan pemasaran. Selain itu juga terdapat dukungan dari masyarakat terkait perbaikan produk. Dukungan yang diperoleh pelaku UMKM bukan hanya berasal dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat dan swasta yang bermitra langsung dengan pelaku UMKM di Kota Madiun. Layaknya temuan Ika Masruro, dkk (2021) yakni Pemerintah berusaha mengatasi dampak dengan kebijakan prioritas dukungan, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja, digitalisasi UMKM, intensif pajak dan bantuan sosial.

Untuk pengembangan UMKM jangka panjang dan mengatasi dampak pandemi *covid-19* terdapat beberapa alternative strategi yang dilakukan yakni melalui inkubasi bisnis, digitalisasi UMKM, dan Pro-UMKM yang keseluruhannya memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku UMKM dan masyarakat/swasta serta merupakan program jangka panjang yang berkelanjutan bagi pengembangan UMKM di Kota Madiun. sama halnya dengan temuan Nungky Islami, dkk (2021) yakni diperlukan strategi jangka panjang dengan menggunakan *roadmap* pengembangan UMKM berbasis digital serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi untuk memberdayakan UMKM melalui program CSR.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan strategi terkait pengembangan UMKM pada Masa Pandemi *covid-19* di Kota Madiun yakni Inkubasi bisnis, Digitalisasi UMKM, dan Pro-UMKM. Dimana setelah melalui penghitungan menggunakan AHP dengan penilaian dari para tiga pakar yang dianggap paham dengan permasalahan terkait UMKM di Madiun menghasilkan strategi Inkubasi Bisnis sebagai strategi prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka pengembangan UMKM pada masa pandemi *covid-19* di Kota Madiun.

IV. KESIMPULAN

Faktor pendukung pada pengembangan UMKM pada masa pandemi *covid-19* di Kota Madiun ialah terkait dengan ide usaha, alat dan fasilitas kerja, perizinan usaha, modal usaha, penyempurnaan produk dan usaha, standarisasi dan perizinan produk serta respon konsumen dan perbaikan produk yang didukung oleh bantuan baik dari Pemerintah, swasta dan masyarakat. Faktor penghambat pada pengembangan UMKM pada masa pandemi *covid-19* di Kota Madiun ialah terkait dengan rencana pengelolaan, kondisi pasar dan konsumen, konsep awal produk, pemasaran dan produksi yang terhambat akibat kondisi yang terjadi pada masa pandemi *covid-19*.

Strategi pengembangan UMKM pada masa pandemi *covid-19* yang dapat dilakukan di Kota Madiun ialah melalui inkubasi bisnis, digitalisasi bisnis dan Program Pro UMKM. Ketiga strategi tersebut diolah penulis melalui *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yang melibatkan penilaian tiga pakar dari Disnaker KUKM Kota Madiun yang ditentukan penulis dengan hasil strategi inkubasi bisnis sebagai strategi prioritas yang dapat dilaksanakan dalam pengembangan UMKM di Kota Madiun pada masa pandemi *covid-19*.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi pengembangan UMKM di Kota Madiun untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alina, Aldea Noor. 2020. "Analisis Fisik Dan Lingkungan Kesesuaian Lahan Untuk Rekomendasi Arah Tata Ruang Kota Madiun." *Elipsoida: Jurnal Geodesi Dan Geomatika* 3(2).
- Anoraga, P. 2004. *Manajemen Bisnis. Cetakan Ketiga*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Anwas, O. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Jakarta: Alfabeta.
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Farid, Muhammad. 2020. "Kebijakan Politik Presiden Jokowi Terhadap Masalah Kewarganeraan Dalam Merespons Isu Global: Studi Kasus Covid-19." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8(1):1–12.
- Islami, Nungky Wanodyatama, Fajar Supanto, and Arisanto Soeroyo. 2021. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM Yang Terdampak Covid-19." 2(1):45–57.
- Kartiko, Nafis Dwi, and Ismi Fathia Rachmi. 2021. "Strategi Pemulihan Pandemi Covid-19 Bagi Sektor UMKM Di Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 2(5):624–37.
- Kirigia, Jose M., and Rose Nabi Deborah Karimi Muthuri. 2020. "The Fiscal Value of Human Lives Lost from Coronavirus Disease (COVID-19) in China." *BMC Research Notes* 13(1):1–5. doi: 10.1186/s13104-020-05044-y.
- Kohne, A. 2019. *Business Development: Customer-Oriented Business Development for Successful Companies*. Jerman: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Masruroh, Ika, Rizky Andrian, and Frieda Arifah. 2021. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Di Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1(1):41–48.
- Nasution, Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Benefita* 5(2):212–24.
- Natasya, Vina, and Pancawati Hardiningsih. 2021. "Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5(1):141. doi: 10.33087/ekonomis.v5i1.317.
- Purwanto, Niken Paramita. 2020. "Bantuan Fiskal Untuk Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 12(17):19–24.
- Putra, Adnan Husada. 2016. "Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Analisa Sosiologi* 5(2):40–52.
- Sutrisno, Edy. 2020. "Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata." *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 09(November):87–96.
- Wanodyatama, Nungky. 2021. "Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Penguatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Malang." (21):1–8.
- Yusuf, M. dkk. 2020. *Decision Support System Di Era 4.0 Teori & Aplikasi Tools Analysis*. bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
Publikasi BPS: Kota Madiun Dalam Angka 2021
Publikasi BPS: Kota Madiun Dalam Angka 2022
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Madiun
Tahun 2020

